



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 578-594

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

Zhafira Suha Murzha^{1✉}, Muhammad Imanuddin Kandias Saraan²

Universitas Sumatera Utara

Email: zhafirasuhamurzha@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Metode analisis yang digunakan yaitu bersifat deskriptif Kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan berdasarkan empat indikator dari teori implementasi kebijakan Smith (2001) yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kebijakan yang diidealkan sudah berjalan sesuai dengan tujuan Program BPNT. Kelompok sasaran program BPNT di Desa Limau Manis belum terlayani secara optimal karena adanya ketidakakuratan data peserta. Hal ini menyebabkan penyaluran bantuan seringkali terkendala, sehingga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum tercapai secara maksimal. Kompetensi personel Organisasi pelaksana, pegawai Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang sudah paham mengenai Program BPNT dan pada faktor lingkungan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan untuk kunjungan langsung ke rumah KPM. Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang sudah melakukan evaluasi di Kecamatan melalui kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) untuk memastikan pelaksanaan Program BPNT dapat berjalan lebih baik kedepannya.

Kata Kunci: *Bantuan Pangan Non Tunai, Implementasi, Program*

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Limau Manis Village, Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency. The analysis method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted based on four indicators from Smith's (2001) policy implementation theory, namely idealized policies, target groups, implementing organizations, and environmental factors. Translated with DeepL.com (free version) The results of this study show that the idealized policy has been implemented in accordance with the objectives of the BPNT Program. The target group of the BPNT program in Limau Manis Village has not been optimally served due to inaccurate data on participants. This causes the distribution of assistance to be often constrained, so that the program's goal of improving community welfare has not been achieved optimally. The competence of the personnel of the implementing organization, the Deli Serdang Regency Social Service already understands the BPNT Program and on environmental factors there is still a lack of socialization carried out for direct visits to KPM homes. The Deli Serdang District Social Service has conducted an evaluation in the sub-district through the Sub-district Performance Evaluation (EKK) activity to ensure that the implementation of the BPNT Program can run better in the future.

Keywords: *The Non-Cash Food Assistance BPNT, Implementation, Program*

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan hal yang hampir dirasakan oleh berbagai negara di dunia, di Indonesia hal ini menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi karena hal ini menyangkut dengan kesejahteraan warga negara, oleh karena itu kemiskinan memerlukan penanganan yang tepat dengan melibatkan berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan ini. Indonesia termasuk negara berkembang yang masuk kedalam kategori 100 negara termiskin di dunia, Indonesia menduduki peringkat ke 71 pada tahun 2023 dikutip dari catatan Global Finance (Imanudin Abdurrohman. 2023).

Kemiskinan merupakan kondisi yang sulit untuk dihindari terutama pada negara berkembang dan hal ini merupakan kondisi serius yang harus segera ditangani baik oleh individu itu sendiri ataupun pemerintahnya. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam pengentasan kemiskinan maka pentingnya analisis yang tepat didalamnya, pemerintah mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan.

Kemiskinan yaitu suatu kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik secara ekonomi maupun fisiknya. Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya yaitu Sumber Daya Manusia yang kurang memadai seperti halnya masyarakat miskin cenderung memiliki

pendidikan yang rendah, sehingga sulit untuk bersaing dengan yang lainnya dan mengakibatkan tingginya jumlah pengangguran. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini, terdapat Program-Program yang dibuat dalam mengatasi hal tersebut sebagai upaya pengentasan kemiskinan, seperti halnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan hal ini dapat memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah dan berkelanjutan. Menanggapi masalah kemiskinan yang terjadi kementerian sosial telah mengeluarkan Program yang dirancang dan sesuai untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Sosial No. 11 Tahun 2018 tentang penyaluran BPNT yang dilakukan untuk menciptakan penyaluran yang efektif dan tepat sasaran dalam pelaksanaannya.

Peraturan tersebut kemudian disempurnakan dengan peraturan Menteri Sosial No. 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendistribusikan pangan kepada keluarga miskin, dan Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dalam memenuhi kebutuhan pangan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bersumber dari Anggaran Pusat atau APBN yang kemudian dikelola oleh kementerian sosial dan dilimpahkan pada tingkat Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan daerah tersebut dalam memberdayakan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Program BPNT sudah diberlakukan sejak tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Presiden No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai yang mengatakan bahwa bantuan sosial yang diberikan berupa uang melalui kartu elektronik atau yang disebut kartu keluarga sejahtera (KKS) yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu atau masyarakat miskin. (OJK.go.id).

Menanggapi UU No. 13 Tahun 2011 Tentang penanganan Fakir Miskin, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dirancang untuk mengatasi hal tersebut melalui Keputusan Menteri Sosial No:4/HUK/2018, tanggal 2 Januari 2018. Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang telah menyelenggarakan sosialisasi untuk Program ini Darwin Zein S. Sos selaku Sekdakab mengatakan bahwa di Kabupaten Deli Serdang sudah dimulai sejak bulan oktober 2018 yang kemudian bersamaan dengan Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo dan Kota Tanjung Balai. Sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Tanjung Morawa telah melaksanakan Program BPNT sejak tahun 2018, berperan aktif dalam pemenuhan kebutuhan pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui mekanisme pemberian bantuan berbasis elektronik. Program ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas distribusi bantuan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Mekanisme penyaluran BPNT di Kecamatan Tanjung Morawa sudah mengalami perubahan karena tidak menggunakan agen E-Warung, Kartu Keluarga Sejahtera, bank penyalur, dan mesin edc. Di Kecamatan Tanjung Morawa penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan dengan lebih singkat. Pada tahapan pertama, penyiapan data penerima manfaat diambil dari data DTKS yang sudah melewati proses verifikasi kelayakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang kemudian disahkan oleh Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan sosial (KPM).

Tahapan kedua, kementerian yang menangani pelaksanaan BPNT memberitahukan daftar KPM perdesa kepada Bupati Kabupaten Deli Serdang dan pengiriman surat undangan penerima bantuan dari Bupati Kabupaten Deli Serdang ke KPM perdesa melalui Kantor Camat dan masing-masing Kepala Desa untuk disampaikan ke masyarakat serta melakukan sosialisasi. Dan tahap terakhir yaitu pengambilan dana bantuan di Kantor Pos Tanjung Morawa yang dilakukan oleh KPM dengan pendamping BPNT dari pihak Kecamatan melalui beberapa proses seperti verifikasi wajah, KTP, dan surat undangan. Program ini merupakan bentuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan penerima manfaat dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Akan Tetapi, dalam pelaksanaannya ternyata masih kurang berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diketahui dari jumlah data kemiskinan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Deli Serdang merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang tergolong cukup tinggi.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2022 jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 61.582 jiwa dan yang sudah terealisasi sekitar 56.092 jiwa. Tanjung Morawa merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah rumah tangga di Tanjung Morawa sebanyak 48.418 jiwa dan jumlah ini terus bertambah pada tahun 2022 menjadi 48.620 jiwa. Dilihat dari data BPS tahun 2021.

Dalam pelaksanaan Program BPNT di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa tentu saja tidak hanya berjalan mulus seperti apa yang diharapkan, akan tetapi masih terdapat kendala di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa seperti yang dikatakan

Bapak Supriadi selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tanjung Morawa dalam wawancara yang peneliti lakukan saat melakukan pra penelitian masalah yang dihadapi yaitu tidak tepatnya sasaran dalam penerimaan bantuan.

Dalam konteks Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, implementasi BPNT menjadi penting mengingat wilayah ini menghadapi tantangan seperti aksesibilitas layanan perbankan yang terbatas, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi, dan pengelolaan distribusi yang masih memerlukan optimalisasi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas program bantuan sosial berbasis tunai maupun non-tunai dengan berbagai metode implementasi. Studi-studi tersebut menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat dan efisiensi distribusi bantuan. Namun, penelitian-penelitian ini juga mengungkapkan batasan, seperti kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta potensi ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Untuk mengatasi batasan tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi BPNT di Desa Limau Manis dengan pendekatan yang menyoroiti aspek distribusi, literasi keuangan, dan partisipasi masyarakat lokal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi program BPNT di Desa Limau Manis dan mengidentifikasi strategi yang dapat meningkatkan keberlanjutan serta dampak positif program ini dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi program BPNT di Desa Limau Manis dan mengidentifikasi strategi yang dapat meningkatkan keberlanjutan serta dampak positif program ini dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Suharsimi (2007), menjelaskan bahwa: kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya.

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif yang didalamnya penelitian menggunakan nonhipotesis, dalam penyajiannya sebuah gambaran lengkap mengenai settingan sosial

sehingga peneliti hanya menggunakan satu variabel dan tidak memerlukan sebuah hipotesis, maksud dari nonhipotesis syarat dari sebuah hipotesis adalah memiliki dua variabel atau lebih. Gambaran keseluruhan objek penelitian ini menjadikan sasaran penelitian yang sebagai objek penelitian adalah himpunan elemen yang berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Penggunaan metode penelitian deskriptif meliputi analisis dan interpretasi di Lapangan peneliti melakukan pengumpulan data di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa melakukan wawancara dengan Dinas sosial serta para staffnya dan mengumpulkan data-data yang diperlukan serta melakukan survei kerumah masyarakat penerima program BPNT.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data dengan langsung mendatangi lokasi penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data primer ini meliputi observasi terstruktur dan wawancara mendalam.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumentasi dan studi kepustakaan dalam rangka mendukung teknik pengumpulan data primer. Bentuk dari teknik pengumpulan data sekunder meliputi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah dikemukakan maka sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Sumber data sekunder diperoleh peneliti yang merujuk pada data yang sudah ada dan telah dianalisis oleh orang lain.

Analisis data menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong (2017:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam caatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data, yaitu penyajian data, reduksi data, dan kesimpulan, verifikasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk Program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari Program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa Program Program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Smith mengungkapkan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan, yaitu teori implementasi kebijakan Smith (2001) yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan.

Kebijakan yang diidealkan (*Idealized Policy*)

Kebijakan yang diidealkan (*Idealized Policy*), merupakan suatu bentuk interaksi yang dilakukan oleh si pembuat kebijakan agar dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan tersebut, yang nantinya akan diterapkan kepada kelompok sasaran yang didefinisikan. BPNT termasuk sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dilihat dari strategi pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Pertama, menurunkan beban pengeluaran diantaranya melalui Program perlindungan sosial, kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui Program pemberdayaan masyarakat dan UMKM dan ketiga meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar antar wilayah.

Sejalan dengan Program BPNT yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin agar dapat mengurangi beban pengeluaran untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-harinya dan menambah penghasilan masyarakat penerima bantuan dari dana yang diberikan, hal ini sesuai dengan salah satu poin dalam strategi pengurangan kemiskinan. Program BPNT dirancang sebagai salah satu upaya dalam mengurangi angka kemiskinan yang diterapkan pada Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2018.

Rekapitulasi Kemiskinan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018- 2024

No	Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin
1	2020	413. 202	86.260
2	2021	428.123	92.520
3	2022	448. 489	85.280
4	2023	479. 509	82.750
5	2024	508. 139	84.240

Diolah oleh Peneliti dari Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, 2024

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan Data Rekapitulasi Kemiskinan Kabupaten Deli Serdang tahun 2018-2024. Dapat dilihat bahwa sejak di implementasikannya Program BPNT pada Kabupaten Deli Serdang tahun 2018- 2020 jumlah penduduk miskin terus menurun, kemudian ditahun 2021 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin mencapai 92. 520 jiwa dan pada tahun 2022- 2023 jumlah penduduk miskin kembali menurun. Namun, pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 84.240 jiwa.

Penerima bantuan Program BPNT Di Kabupaten Deli Serdang mencapai 27.368 KK yang terlaksana di berbagai Kecamatan. Laporan tersebut merupakan laporan tahunan yang berisikan tentang jumlah penerima bantuan sosial Kabupaten Deli Serdang selama kurun waktu satu tahun, pada periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, data tersebut berisi sebagai berikut :

Berdasarkan Data Rekapitulasi Penerima Program BPNT di wilayah Kecamatan selama periode bulan Januari hingga bulan Desember 2023. Dengan Kecamatan Tanjung Morawa sebagai penerima Bantuan BPNT terbanyak pertama di wilayah Kabupaten deli Serdang dan penerima Bantuan PKH-BPNT terbanyak kedua.

Tujuan Program BPNT selanjutnya yaitu untuk memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM. Gizi yang diperoleh berasal dari bahan pangan yang dibeli KPM menggunakan dana Program BPNT yang diberikan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada awalnya merupakan Program pemerintah yang

menyalurkan bantuan pangan melalui agen e-warung dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai instrumen penyalurannya.

Namun, berdasarkan temuan dari wawancara yang peneliti lakukan dengan sejumlah narasumber bahwa pada tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang penyaluran Program BPNT tidak lagi berupa beras, telur yang disalurkan dari agen e-warung tetapi bantuan berupa uang tunai yang diberikan melalui KKS dan PT.Pos, Dalam pernyataan yang disampaikan Bapak Ahmad Sofyan selaku Kabid penanganan fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Deli serdang dapat dianalisis bahwa mekanisme penyaluran BPNT sudah mengalami perubahan yang awalnya berbentuk sembako yang dibelanjakan melalui saldo KKS tetapi pada tahun 2024 penyalurannya sudah berbentuk uang tunai sebesar Rp. 200.000 per bulannya yang disalurkan melalui 2 agen yaitu KKS BNI dan PT. Pos terdekat. Pemerintah, melalui Kementerian Sosial telah memilih PT Pos dan Bank BNI sebagai dua agen yang berbeda untuk menyalurkan bantuan Program BPNT, keputusan ini diambil untuk memperluas jangkauan penyaluran bantuan.

Berdasarkan pernyataan dalam wawancara yang dilakukan dapat dianalisis bahwa mengingat jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terus bertambah, Kementerian Sosial telah mengambil langkah dengan menetapkan dua agen berbeda untuk menyalurkan Program BPNT. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyaluran dan memastikan bantuan sosial dapat diterima oleh seluruh KPM secara tepat waktu. Berdasarkan pernyataan dari wawancara Bapak Ahmad Sofyan selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dan Bapak Mission selaku Koordinator Pendamping Sosial Kecamatan Tanjung Morawa dapat dianalisis bahwa penyaluran Program BPNT mengalami kendala akibat ketidaksesuaian data antara Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bahkan hanya satu huruf saja dapat menyebabkan KPM tidak dapat mencairkan bantuannya terhambat dan dana mengendap di bank. Solusi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial yaitu memutuskan untuk menyalurkan bantuan kepada KPM yang baru melalui PT. Pos. Akibatnya, saat ini penyaluran masih terbagi, yakni 30% melalui PT. Pos dan 70% melalui rekening KKS di Bank BNI. Untuk pengaduan Program BPNT merupakan pengaduan yang bersifat tidak menerima bantuannya lagi. Hal ini didasari oleh dasar hukum Permensos No. 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Pengaduan terkait Program BPNT memakan jangka waktu 1 jam dengan persyaratan adalah Penduduk Deli Serdang yang masih hidup dan diketahui keberadaannya dan Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Program BPNT selanjutnya bertujuan untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Program ini berkontribusi dalam mencapai beberapa tujuan SDGs, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan juga kesejahteraan masyarakat. Program BPNT diimplementasikan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin untuk kebutuhan pangan. Dengan memastikan ketersediaan pangan yang cukup Program BPNT artinya juga berkontribusi pada pengurangan angka stunting dan gizi buruk yang merupakan salah satu indikator kemiskinan. Jika dilihat lebih lanjut Program BPNT memiliki peran penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan karena Program ini tidak hanya memberikan bantuan pangan kepada masyarakat miskin, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan pengentasan kemiskinan. Program BPNT memberikan akses kepada masyarakat terhadap berbagai jenis pangan pokok dan tambahan yang bergizi, seperti beras, telur, sayur, dan buah. Melalui Program ini, tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan kalori harian tetapi juga memberikan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan, serta diharapkan dapat meningkatkan status gizi, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Dengan meningkatkan status gizi sejak dini, Program BPNT dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Kelompok Sasaran (Target Group)

Kelompok sasaran merupakan individu/kelompok masyarakat yang menerima suatu kebijakan dan paling terpengaruh oleh kebijakan yang dibuat. Oleh karena itu suatu proses implementasi kebijakan dilihat dari bagaimana respon atau daya tanggap kelompok sasaran, jika kelompok sasarannya berlapang hati untuk menerima dan menjalankan kebijakan yang ditetapkan tanpa ada yang mengeluh maka kebijakan tersebut akan berhasil. Berdasarkan buku pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial mengenai Program BPNT yang menjadi kelompok sasaran (*Target Group*), antara lain: 1) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. 2) Sumber data KPM adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM), yang merupakan hasil pemutakhiran basis data terpadu tahun 2015. 3) DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Pokja Data), yang dibentuk melalui SK Mensos No. 284/HUK/2016 tanggal 21/9/2016, yang diperbaharui melalui SK Mensos No.30/HUK/2017 tanggal 16/3/2017. Pokja Data terdiri dari:

Kemenko PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kemensos, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat TNP2K.

Dinas Sosial memastikan bahwa Program BPNT dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan, tanpa memandang perbedaan wilayah atau kelompok marginal. Bagi masyarakat yang wilayahnya sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan fisik membutuhkan bantuan yang belum terdata dalam DTKS, dapat menyampaikan pengaduan melalui media sosial Facebook milik Dinas Sosial. Tim bidang penanganan fakir miskin akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan seperti mengunjungi rumah calon KPM untuk mengambil berkas. Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa perangkat desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan Program BPNT. Mereka bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Keberadaan perangkat desa yang aktif dan proaktif dapat membantu memastikan bantuan tepat sasaran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait kelompok sasaran pada Program BPNT masih terdapat kendala yaitu tidak tepatnya sasaran KPM Program BPNT, hal ini dapat dilihat dari fenomena yang ada pada latar belakang bahwa adanya pengaduan ke Dinas sosial terkait KPM BPNT di Desa Limau Manis yang dilaporkan memiliki tiga unit mobil dan sepeda motor, setelah dilakukan peninjauan lebih lanjut dan ternyata laporannya terbukti KPM diberhentikan bantuan BPNTnya.

Berdasarkan pernyataan KPM Program BPNT Desa Limau Manis dalam wawancara yang dilakukan, penulis dapat dianalisis bahwa kendala terkait adanya KPM yang sudah mampu secara ekonomi namun masih menerima bantuan sosial merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan serius. Tidak hanya Dinas Sosial, namun juga masyarakat dan perangkat desa memiliki peran penting dalam mengatasi hal ini. Adanya KPM yang seperti ini seringkali disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan kondisi ekonominya, sehingga bantuan sosial tidak dapat dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, dapat dianalisis bahwa terdapat mekanisme untuk memverifikasi masalah terkait data KPM dengan melakukan peninjauan ke langsung ke rumah-rumah KPM Program BPNT. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tetap tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, untuk hal ini juga Dinas Sosial membutuhkan peran dari pihak instansi pendidikan di tingkat Universitas yaitu Fisip Universitas Sumatera Utara untuk membantu

Dinas Sosial dalam melakukan survei di lapangan, Walaupun rencana melibatkan mahasiswa dalam survei lapangan sangat baik, namun belum dapat direalisasikan karena padatnya kegiatan akademik mahasiswa, dalam merealisasikan hal ini menjadi tantangan tersendiri. Perlu adanya penjadwalan yang lebih fleksibel agar mahasiswa dapat berpartisipasi.

Organisasi Pelaksana (Implementing Organization)

Organisasi Pelaksana (*Implementing Organization*) merupakan administrator/birokrat yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsinya. Organisasi pelaksana berperan penting dalam mengimplementasikan Program BPNT karena organisasi pelaksana berperan sebagai badan atau lembaga yang secara langsung bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi pelaksana yaitu sumber daya, kompetensi personel dan struktur organisasi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dari hasil wawancara bersama beberapa narasumber, maka dapat dianalisis bahwa organisasi pelaksana pada Program BPNT dari segi sumber dayanya masih belum optimal karena dalam wawancara yang peneliti lakukan bersama beberapa KPM Program BPNT mengatakan masih kurangnya pemantauan yang dilakukan baik oleh Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang ataupun pihak Kecamatan.

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa pihak Kecamatan Tanjung Morawa mengakui telah melakukan upaya pemantauan lapangan, namun pemantauan tidak dapat sering dilakukan yang disebabkan oleh keterbatasan personel. Luasnya wilayah Kecamatan Tanjung Morawa yang terdiri dari 26 desa menjadi tantangan ketika melakukan pengawasan secara rutin. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya peningkatan sumber daya manusia untuk mendukung pemantauan Program BPNT di lapangan. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya kerja sama antara Dinas Sosial dan pemerintah desa, di mana pemerintah desa diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam pemantauan dan penyaluran bantuan mengingat pemahaman mereka yang lebih baik terhadap kondisi masyarakat di tingkat desa.

Namun, tidak semuanya memiliki pengalaman terkait Program ini. Untuk pegawai yang ditugaskan turun langsung ke lapangan merupakan pegawai yang sudah menguasai, karena pegawai di Dinas Sosial diberikan pelatihan cara mengoperasikan aplikasi SIKS NG. Agar dapat bisa membantu atau memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat KPM ataupun calon KPM dalam menginput data ataupun perubahan data dimana saja dan kapan saja. Pelatihan dan pengembangan kapasitas dilakukan untuk setiap pegawai Dinas

Sosial Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan kerja mereka dalam Program BPNT, seperti yang dikatakan Bapak Ahmad Sofyan selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dalam wawancara dengan peneliti. Dalam pernyataan tersebut, dapat dianalisis bahwa Dinas Sosial menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan perangkat desa dalam mengelola data penerima Program BPNT. Hal ini dilakukan agar administrator yang terlibat langsung dalam Program BPNT dapat memaksimalkan kinerjanya. Dengan demikian, data KPM dapat selalu terbaru dan akurat. Bagi Calon KPM pun dapat dengan mudah melakukan verifikasi data untuk segera menikmati manfaat Program.

Koordinasi antar organisasi pelaksana sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan Program BPNT dari tingkat pusat Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa hingga akhirnya sampai ke Desa Limau Manis untuk disalurkan ke KPM. Koordinasi dilakukan agar menciptakan komunikasi yang baik dan meningkatkan transparansi untuk memudahkan dalam memantau dan mengevaluasi kinerja Organisasi pelaksana dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Berdasarkan pernyataan Bapak Ahmad Sofyan selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang tersebut, dapat dianalisis bahwa Dinas Sosial telah melaksanakan evaluasi Kecamatan (EKK) terhadap kinerja Kecamatan yang dilakukan untuk bidang Kesejahteraan Sosial dan Pendamping Sosial. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala ataupun proses pada saat penyaluran Program BPNT. Komunikasi dan koordinasi yang selama ini dilakukan melalui via telepon atau kunjungan langsung.

Faktor Lingkungan (*Environmental Factor*)

Faktor lingkungan merupakan tantangan di lapangan dari masyarakat untuk melihat sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan Program BPNT. Faktor lingkungan dalam Program BPNT mencakup sejauh mana pemahaman masyarakat terkait Program BPNT, bagaimana sosialisasi yang telah dilakukan dari organisasi pelaksana, sudah sejauh mana evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan Program BPNT.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dari hasil wawancara bersama narasumber terkait sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai Program BPNT masih terdapat KPM Program BPNT yang belum paham. Bapak Ahmad Sofyan selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang pada wawancara dengan peneliti, mengatakan sebagai berikut, "Kalau terkait paham nggaknya, masih ada juga lah masyarakat yang gak ngerti contohnya kenapa bantuannya tiba-tiba berhenti.

(Wawancara Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, 22 Juli 2024).

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa Program BPNT yang berhenti dapat terjadi karena setelah dilakukan survei di lapangan dianggap sudah mampu dan tidak adanya laporan kesadaran diri sendiri untuk mengundurkan diri. Oleh karena itu pihak Dinas Sosial akan memberhentikan bantuan. Pemberhentian bantuan yang dilakukan tentu saja membutuhkan koordinasi untuk mensinkronkan data KPM agar tidak terjadi duplikasi atau kesalahan data. Koordinasi yang dilakukan Kecamatan Tanjung Morawa masih belum optimal, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti bahwa masih kurangnya koordinasi antara Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tanjung Morawa yang menanggung jawabi Program BPNT dengan Pendamping Sosial Kecamatan Tanjung Morawa yang menjadi jembatan antara KPM dengan pemerintah. Kurangnya komunikasi dapat menjadi penghambat karena permasalahan yang timbul terkait Program BPNT tidak tersampaikan kepada pihak yang berwenang. Namun, koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tanjung Morawa sudah berjalan dengan baik, koordinasi selama ini berjalan melalui zoom meeting sehingga terjadinya komunikasi 2 arah antara pihak terkait.

Permasalahan yang terjadi dari lingkungan eksternal muncul dari segi teknologi, perangkat desa yang belum terlalu paham mengoperasikan aplikasi SIKS NG menjadikan data akan lama untuk terupdate. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mission selaku Koordinator Pendamping Sosial tersebut, dapat dianalisis bahwa masih terdapat perangkat desa yang belum terlalu paham menggunakan aplikasi SIKS NG, sehingga menghambat dalam pengecekan data pengusulan di DTKS. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada Perangkat Desa, yang menjadikan kurangnya interaksi antara kedua pihak. Pembaruan data harus terus dilakukan untuk meminimalisir kesalahan data, Sosialisasi yang dilakukan untuk KPM tidak hanya berasal dari Dinas Sosial, tetapi dari pihak Kecamatan dan juga desa juga harus ikut berperan. Dengan begitu Program BPNT akan berjalan dengan maksimal.

Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang menemukan bahwa keterlambatan atau ketidakadaan surat undangan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mengambil bantuan BPNT. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Sosial kini mengandalkan media sosial Facebook sebagai sarana informasi utama terkait penyaluran Program BPNT. Sistem monitoring dan evaluasi dari Kecamatan juga diperlukan untuk

memantau kinerja Program BPNT dalam mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam berjalannya Program BPNT.

Program BPNT membutuhkan data yang jelas dan indikator untuk mengukur tingkat keberhasilannya dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sasaran. Berdasarkan pernyataan Bapak Ahmad Sofyan selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang bahwa Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang mengukur keberhasilan Program BPNT dalam mengurangi kemiskinan dengan melihat persentase penerima bantuan yang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Apabila banyak masyarakat yang mampu akibat diberikan bantuan Program BPNT berarti Program dapat bermanfaat bagi kelompok sasaran. Di Kecamatan Tanjung Morawa.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat dari bagaimana kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungannya. Sebagai kebijakan yang diidealkan Program BPNT dapat dikatakan sudah mengurangi beban pengeluaran KPM Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM karena dana yang diberikan melalui Program BPNT dimanfaatkan sesuai dengan tujuan Program untuk membeli beras, ayam, dan telur.

Mengacu pada rumusan masalah terkait kendala yang terjadi akibat ketidaktepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan, kini sudah di evaluasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dengan mengganti mekanisme sosialisasi dan informasi terkait nama dan jadwal penyaluran melalui sosial media Facebook, dengan tujuan agar dapat menjangkau seluruh KPM di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Pada Organisasi pelaksana, SDM pada Dinas Sosial masih terbatas sehingga untuk menjangkau seluruh Wilayah Kabupaten Deli Serdang akan membutuhkan waktu yang lama, Struktur Organisasi pada Program BPNT di Kabupaten Deli Serdang memiliki hierarki dan pembagian tugas yang jelas mulai dari Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial pada Kabupaten Deli Serdang kemudian pada tingkat Kecamatan terdapat Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tanjung Morawa dan di tingkat Desa terdapat Kepala Desa yang berwenang untuk masyarakat penerima Program BPNT mengingat bahwa Perangkat Desa lebih mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonomi dari setiap masyarakatnya. Namun,

koordinasi antara pihak Desa dan dinas sosial serta pendamping sosial kecamatan dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial masih kurang. Sosialisasi Dinas Sosial Kabupaten berupa kunjungan langsung ke Kecamatan Tanjung Morawa dan juga desa juga jarang dilakukan. Sehingga apabila terdapat kendala KPM lebih sering menyampaikannya ke Kepala Dusun. Terkait monitoring, Dinas Sosial melakukannya dengan cara mendampingi KPM saat penyaluran di PT. Pos atau Bank penyalur dan monitoring yang telah dilakukan Kecamatan Tanjung Morawa yaitu dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah KPM *door to door* untuk melakukan pengecekan yang masih berlanjut hingga sekarang.

Melalui Program BPNT, maka akan memberikan akses kepada KPM untuk memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisinya, dengan meningkatkan gizi sejak dini, Program BPNT secara tidak langsung membantu meningkatkan kualitas SDM dimasa depan dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab. (2008). Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. . Bumi Aksara.
- Adriana T. (2020). Pengaruh Tingkat Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Dan Produktivitas Terhadap Kemiskinan Di Kalimantan.
- Agustina, D., & Megawati, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. *Publika*, 175-190.
- Anwar, D. P., Ati, N. U., & Pindahanto, R. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *Respon Publik*, 14(3), 1-7.
- Asrin, A., Achmad, F. Y. N., & Sadat, A. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Baadia Kota Baubau. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 7(2), 108- 120.
- Bororing, T., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2022). Pengawasan Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Modinding. *Governance*, 2(2).
- Bps. (2020). Bps. <https://Pusdiklat.Bps.Go.Id/Diklat>
- Cresswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. . Pustaka Pelajar.
- S Wibawa. (1994). Kebijakan Publik: Proses Dan Analisis (1st Ed.). Graha Ilmu. Siyoto Dan Sodik. (2015). Metodologi. Literasi Media Publishing.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D . Alfabeta.
Tangkilisan. (2003). Implementasi Kebijakan Publik. Alfabeta.
Theresia. (2019). Pembangunan Berbasis Masyarakat. Alfabeta. Winarno, B. (2008).